

**CATATAN DAN REKOMENDASI
TERHADAP
LKPJ GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

A. Urusan Pangan

Catatan:

1. Secara umum, urusan Pangan di DIY masih menyisakan sejumlah masalah yang harus segera diselesaikan. Walau Indikator Kinerja Skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2018 dapat terealisasi 89,92 (realisasi target 100%), namun skor tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 90,4.
2. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik karena adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan karena sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana.
Namun kenyataannya di DIY masih terdapat desa rawan pangan. Artinya, tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di DIY belum dapat diwujudkan.
3. Aspek keamanan pangan masih cukup memprihatinkan.

Rekomendasi:

1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi, advokasi, dan promosi terus menerus, sampai ke tingkat RT dan menyasar lembaga pendidikan dasar dan menengah.
2. Program dan kegiatan pengentasan Desa Rawan Pangan belum dapat berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih adanya 7 Desa Rawan Pangan DIY. Adanya Desa Rawan Pangan disebabkan oleh rendahnya

aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Penyelesaian terhadap berbagai penyebab di atas harus segera dilakukan secara tuntas, dan mestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adalah sesuatu yang salah apabila di wilayah DIY yang relatif kecil dan mudah dijangkau, apabila masih terdapat masalah aksesibilitas dan kesulitan mengatasi kondisi geografis. Mereka yang masih tergolong miskin dan rentan hendaknya dapat diberi perhatian khusus dengan mengalokasikan cadangan pangan yang tersedia.

3. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) perlu meningkatkan kerjanya dengan semakin memperluas wilayah pengawasan produksi dan peredaran pangan. Masih banyak produksi pangan yang beredar di masyarakat yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Untuk dapat bertindak lebih jauh, diperlukan sebuah peraturan di tingkat lokal (baik Perda maupun Pergub).

B. Urusan Kelautan dan Perikanan

Catatan:

1. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya terus menunjukkan peningkatan, sedangkan perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 ke tahun 2018 produksi ikan budidaya meningkat sebesar 48,99%. Sedangkan perikanan tangkap menurun sebesar 7,18%. Keduanya memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan produksinya yang juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Areal budidaya ikan yang sudah dipakai untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport sampai saat ini belum ada lahan pengganti.

Rekomendasi:

1. Salah satu masalah yang dialami oleh para pembudidaya ikan selama ini adalah tingginya biaya produksi akibat mahal dan terus meningkatnya harga pakan ikan. Selain itu sulit dan mahalnya bibit ikan jenis tertentu yang harus didatangkan dari luar daerah.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka OPD terkait diminta untuk bersungguh-sungguh memberikan solusi, baik masalah pakan maupun bibit ikan. Para pembudidaya difasilitasi untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau. Demikian juga untuk masalah bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.

Guna meningkatkan produksi ikan tangkap, para nelayan perlu terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Termasuk kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal ikan besar.

C. Urusan Pertanian**Masalah:**

1. Alih fungsi lahan pertanian pangan produktif masih terus berlangsung.
2. Minat generasi muda untuk bekerja di bidang usaha pertanian semakin menurun.

Rekomendasi:

1. Selama Pemda DIY tidak berani tegas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (termasuk menyusun regulasi turunannya), maka alih fungsi lahan akan sulit dikendalikan. Pemda DIY harus bersikap tegas terhadap pemerintah daerah Kabupaten agar berkomitmen untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Generasi muda kurang berminat untuk bekerja di sektor pertanian karena tidak melihat peluang untuk hidup lebih baik dengan bertani.

Mereka melihat orang tua dan keluarga mereka yang menjadi petani yang masih jauh dari sejahtera. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meyakinkan mereka agar mau bekerja di bidang usaha pertanian. Mereka perlu dibuka wawasannya tentang cerahnya sektor pertanian sebagai sandaran hidup. Mereka diberikan ketrampilan plus, ketrampilan bertani dan kemampuan berwirausaha.

D. Urusan Kehutanan

Catatan:

1. Luas lahan di DIY mencapai 30,61% dari wilayah DIY seluas 3.185,80 km². Angka ini sudah ideal. Akan tetapi sewaktu-waktu dapat berkurang karena didominasi oleh hutan rakyat, dan Pemda DIY belum memiliki data potensi untuk pengembangan hutan rakyat.
2. Meningkatnya jumlah ekowisata dapat mengancam kerusakan hutan.

Rekomendasi:

1. Dari total hutan DIY seluas 97.534,22 ha, hutan negara hanya seluas 19.133,95 ha. Sedangkan hutan rakyat seluas 78.400,27 ha (80,38%). Kondisi ini berpotensi untuk berkurang sewaktu-waktu, karena pemilik berhak penuh untuk memanen/menebang dan melakukan alih fungsi hutan. OPD terkait harus pandai bernegosiasi dengan pemilik agar mau diajak mengelola hutan milik mereka dengan pola pengelolaan terpadu. Pemilik diberikan fasilitas tanaman non hutan yang dapat dijadikan sumber pendapatan alternatif di luar kayu.
2. Walaupun ekowisata sangat menjanjikan dari sisi pendapatan, namun harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari hutan. Pemda DIY hendaknya membatasi pemberian izin pengelolaan hutan sebagai eko wisata. Walaupun bukan sebagai satu-satunya penyebab, jangan-jangan banjir yang terjadi di Bantul bagian selatan juga terjadi karena keseimbangan hutan yang sudah terganggu.